



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Soedirman No.540 Purwokerto Kode Pos 53116.
Telp. (0281) 627965, 624521 Faksimile (0281) 624521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, maka Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 66);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Perizinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Petugas/Aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku , maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai mekanisme, persyaratan dan waktu penyelesaian tercantum sebagaimana dalam lampiran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal : 20 Juni 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Bupati Banyumas;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas;

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi. 2. Memahami ketentuan tentang izin Nomor Induk Berusaha	
KETERKAITAN 1. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi OSS	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id				Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS				Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan				Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP				Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS				Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB				Nomor Induk Berusaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPTSP	DINPORA BUDPAR				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	



	teknis								
8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi					TDUP	1 Hari	TDUP	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN USAHA PERDAGANGAN (sama dg NIB)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin Usaha Perdagangan.

KETERKAITAN

1. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

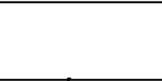
4. Komputer
5. Printer
6. Aplikasi OSS

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id				Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS				Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan				Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP				Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS				Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB				Nomor Induk Berusaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN USAHA TOKO MODERN (=TDUP)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin Usaha Toko Modern

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINPERIN DAG				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan					Surat Permohonan Rekomendasi Toko Modern	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	



	rekomendasi ke dinas teknis								
8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi Toko Modern	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi					Izin Usaha Toko Modern	1 Hari	Izin Usaha Toko Modern	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (TDUP)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin Usaha Pusat Perbelanjaan

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

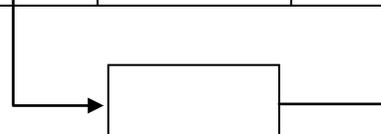
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINPERIN DAG				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	



7	DMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis					Surat Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	
8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DMPPTSP					Surat Rekomendasi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DMPPTSP melakukan notifikasi					Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	1 Hari	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN USAHA PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. PP 24/2018
3. Permendag 77/2018
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin penelitian.

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

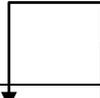
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINPERIN DAG				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis					Surat Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi				Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional	1 Hari	Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional		



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDUP poin 9 ganti penerbitan oleh PTSP)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. PP 24/2018
3. Permendag 77/2018
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin penelitian.

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

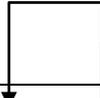
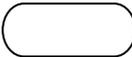
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINPERIN DAG				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis					Surat Permohonan Rekomendasi Izin Tanda Daftar Gudang	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi Izin Tanda Daftar Gudang	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi					Izin Tanda Daftar Gudang	1 Hari	Izin Tanda Daftar Gudang	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN LOKASI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin penelitian.

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

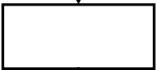
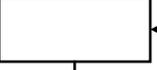
1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINAS TEKNIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Lokasi	5 menit		
2	Verifikasi Data					Data Persyaratan Permohonan Izin Lokasi	10 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data dan Penerbitan Surat Rekomendasi					Data Persyaratan Permohonan Izin Lokasi	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Lokasi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi Izin Lokasi	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Lokasi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinas Tekait					Surat Rekomendasi Izin Lokasi	10 menit		
6	Menerima Rekomendasi, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi					Surat Izin Lokasi	10 menit	Surat Izin Lokasi	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Lokasi					Surat Izin Lokasi	5 menit	Surat Izin Lokasi	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin penelitian.

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

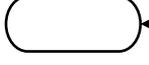
1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DPU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan	5 menit		
2	Verifikasi Data					Data Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan	10 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data dan Penerbitan Surat Rekomendasi					Data Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Penelitian	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Penelitian	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinas Teknis					Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan	10 menit		
6	Menerima Rekomendasi, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan					Surat Izin Mendirikan Bangunan	10 menit	Surat Izin Mendirikan Bangunan	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Mendirikan Bangunan					Surat Izin Mendirikan Bangunan	5 menit	Surat Izin Mendirikan Bangunan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN JASA KONSTRUKSI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin penelitian.

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

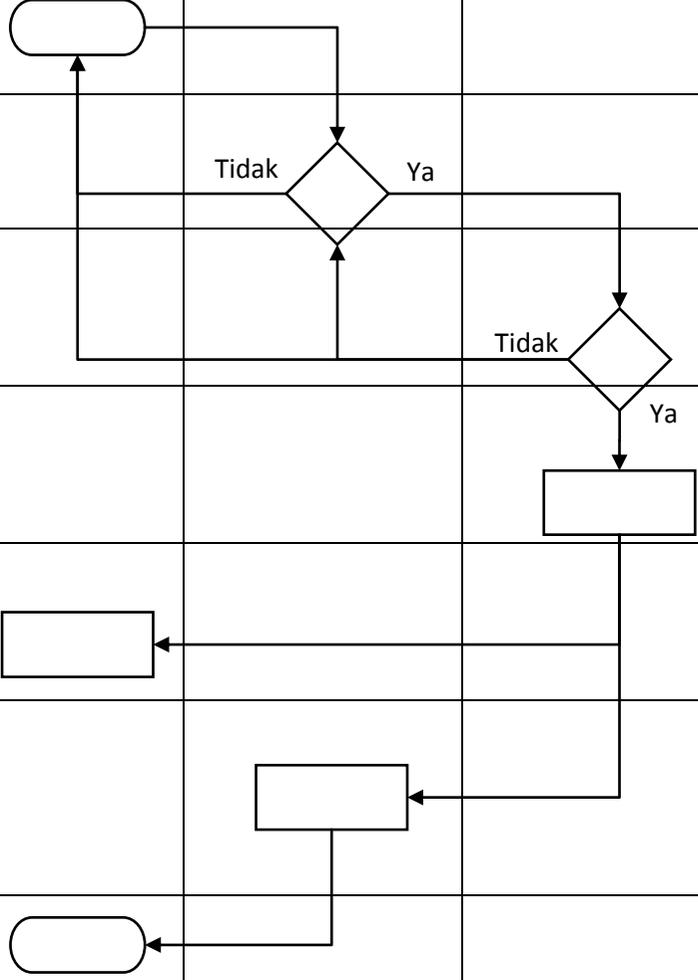
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINAS TEKNIK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online				Data Persyaratan Permohonan Izin Jasa Konstruksi	5 menit		
2	Verifikasi Data				Data Persyaratan Permohonan Izin Jasa Konstruksi	10 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data dan Penerbitan Surat Rekomendasi				Data Persyaratan Permohonan Izin Jasa Konstruksi	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi				Surat Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinas Tekait				Surat Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi	10 menit		
6	Menerima Rekomendasi, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Jasa Konstruksi				Surat Izin Jasa Konstruksi	10 menit	Surat Izin Jasa Konstruksi	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Jasa Konstruksi				Surat Izin Jasa Konstruksi	5 menit	Surat Izin Jasa Konstruksi	





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN USAHA ANGKUTAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin penelitian.

KETERKAITAN

- 1.

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

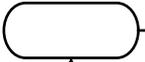
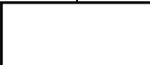
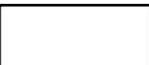
4. Komputer
5. Printer
6. Aplikasi SIPANJIMAS

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINHUB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Angkutan	5 menit		
2	Verifikasi Data					Data Persyaratan Permohonan Izin Angkutan	10 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data dan Penerbitan Surat Rekomendasi					Data Persyaratan Permohonan Izin Angkutan	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Angkutan	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi Izin Angkutan	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Angkutan	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinas Terkait					Surat Rekomendasi Izin Angkutan	10 menit		
6	Menerima Rekomendasi, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Penelitian					Surat Izin Angkutan	10 menit	Surat Izin Angkutan	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Angkutan					Surat Izin Angkutan	5 menit	Surat Izin Angkutan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN PERIKANAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin penelitian.

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan	5 menit		
2	Verifikasi Data					Data Persyaratan Permohonan	10 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data dan Penerbitan Surat Rekomendasi					Data Persyaratan Permohonan	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Perikanan	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Perikanan	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi	10 menit		
6	Menerima Rekomendasi, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Perikanan					Surat Izin Perikanan	10 menit	Surat Izin Perikanan	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Perikanan					Surat Izin Perikanan	5 menit	Surat Izin Perikanan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN PETERNAKAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin penelitian.

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

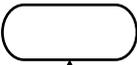
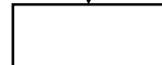
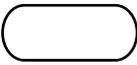
1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINAS PETERNAKAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan	5 menit		
2	Verifikasi Data					Data Persyaratan Permohonan	10 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data dan Penerbitan Surat Rekomendasi					Data Persyaratan Permohonan	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Peternakan	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Peternakan	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi	10 menit		
6	Menerima Rekomendasi, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Peternakan					Surat Izin Peternakan	10 menit	Surat Izin Peternakan	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Peternakan					Surat Izin Peternakan	5 menit	Surat Izin Peternakan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN OPERASIONAL KLINIK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin penelitian.

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

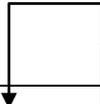
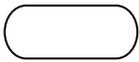
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINKES				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi					Izin Operasional Klinik	1 Hari	Izin Operasional Klinik	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN OPTIK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin optik

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

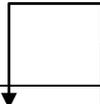
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINKES				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi					Izin Optik	1 Hari	Izin Optik	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN TOKO OBAT

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin toko obat

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

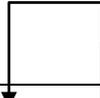
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINKES				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

8	Dinas teknis mengirim rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi					Izin Toko Obat	1 Hari	Izin Toko Obat	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN APOTEK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin apotek.

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

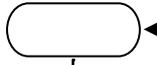
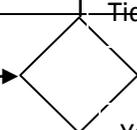
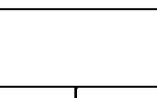
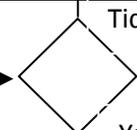
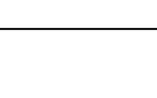
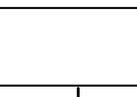
1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

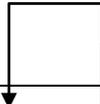
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINKES				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi					Izin Apotek	1 Hari	Izin Apotek	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

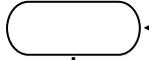
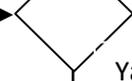
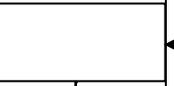
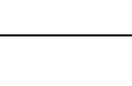
1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

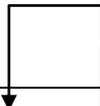
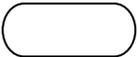
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINKES				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi				Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT)	1 Hari	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT)		



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin operasional rumah sakit

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

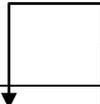
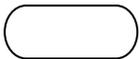
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINKES				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

8	Dinas teknis mengirim rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi					Izin Operasional Rumah Sakit	1 Hari	Izin Operasional Rumah Sakit	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA / UTAMA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin operasional klinik pratama

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

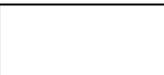
1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINKES				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendas	

	rekomendasi ke dinas teknis							i	
8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi					Izin Operasional Klinik Pratama / Utama	1 Hari	Izin Operasional Klinik Pratama / Utama	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN LABORATORIUM KESEHATAN / KLINIK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin laboratorium kesehatan

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

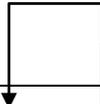
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINKES				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi				Izin Laboratorium Kesehatan / Klinik	1 Hari	Izin Laboratorium Kesehatan / Klinik		



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin usaha mikro obat tradisional

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

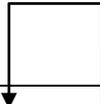
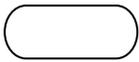
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINKES				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi					Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	1 Hari	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN TOKO ALAT KESEHATAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin toko alat kesehatan

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINKES				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

	teknis								
8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi					Izin Toko Alat Kesehatan	1 Hari	Izin Toko Alat Kesehatan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

**PELAYANAN IZIN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA (PRT)
ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin perusahaan rumah tangga (PRT) alat kesehatan dan perbekalan

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

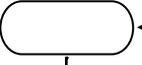
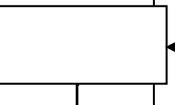
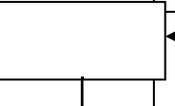
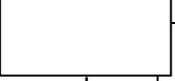
1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPTSP	DINKES				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

	teknis								
8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DMPPTSP melakukan notifikasi					Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan	1 Hari	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin mendirikan rumah sakit

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

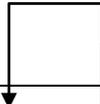
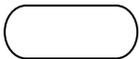
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINKES				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi				Izin Mendirikan Rumah Sakit	1 Hari	Izin Mendirikan Rumah Sakit		



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP

106 Tahun 2019

TANGGAL PEMBUATAN

20 Juni 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

20 Juni 2019

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP AP

PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
2. Memahami ketentuan tentang izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa

KETERKAITAN

1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi OSS

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

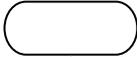
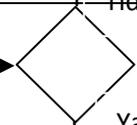
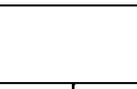
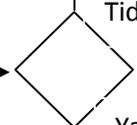
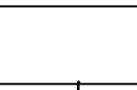
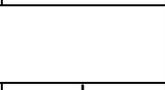
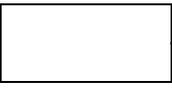
1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi OSS

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		PEMOHON	LEMBAGA OSS	DPMPPTSP	DINKES				
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Pemohon melakukan Permohonan hak akses dan Registrasi melalui aplikasi online single submission http://oss.go.id					Data Permohonan hak akses	5 menit	Data Permohonan hak akses	
2	Lembaga OSS melakukan konfirmasi Akun Registrasi OSS					Data Username, Password dan nomor identitas	5 menit	Konfirmasi Permohonan	
3	Pemohon melakukan perekaman data perusahaan					Data Akta Pendirian dan Perubahan	45 menit	Data perusahaan	
4	Lembaga OSS melakukan validasi perekaman data perusahaan dan NPWP					Data Permohonan Berusaha	5 menit	Surat Permohonan Berusaha	
5	Pemohon mengisi permohonan berusaha melalui aplikasi OSS					Data Permohonan Berusaha	45 menit	Data Permohonan Berusaha	
6	Lembaga OSS menerbitkan NIB dan izin usaha yang belum efektif					Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	5 menit	Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha	
7	DPMPPTSP mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis					Surat Permohonan Rekomendasi	1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi	

8	Dinas teknis mengirimkan rekomendasi kepada DPMPPTSP					Surat Rekomendasi	3 Hari	Surat Rekomendasi	
9	DPMPPTSP melakukan notifikasi					Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa	1 Hari	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

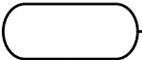
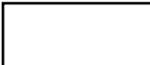
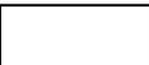
	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS,</p>  <p>HERNI SULASTI SH., M.H. Kepala Utama Muda 19670610 199503 2 002</p>
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA REKAM MEDIS
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008)6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin praktik tenaga rekam medis	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online				Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Tenaga Rekam Medis	15 menit			
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Tenaga Rekam Medis					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Tenaga Rekam Medis	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Tenaga Rekam Medis dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Rekam Medis					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Tenaga Rekam Medis	3 Hari	Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Rekam Medis	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Rekam Medis					Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Rekam Medis	1 Hari	Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Rekam Medis	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkes					Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Rekam Medis	30 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Penelitian, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Praktik Tenaga Rekam Medis					Surat Izin Praktik Tenaga Rekam Medis	1Hari	Surat Izin Praktik Tenaga Rekam Medis	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

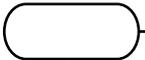
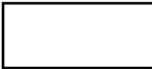
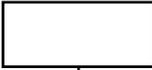
	NOMOR SOP	106 Tahun 2016
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerja dan Praktik Ortotis Prostetis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 655)6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin praktik ortitis protetis	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Ortotis Prostetis	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Ortotis Prostetis					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Ortotis Prostetis	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Ortotis Prostetis dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Praktik Ortotis Prostetis					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Ortotis Prostetis	5 hari	Surat Rekomendasi Izin Praktik Ortotis Prostetis	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Praktik Ortotis Prostetis					Surat Rekomendasi Izin Praktik Ortotis Prostetis	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Praktik Ortotis Prostetis	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Kesbangpol					Surat Rekomendasi Izin Penelitian	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Praktik Ortotis Prostetis, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Praktik Ortotis Prostetis					Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis	30 menit	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis					Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis	15 menit	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS,</p> <p>HERNI SULASTI SH., M.H. Kepala Utama Muda 19670610 199503 2 002</p>
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTIK PSIKOLOGIS KLINIS
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1493)6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin praktik psikologis klinis	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Psikologis Klinis	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Psikologis Klinis		Tidak	Ya		Data Persyaratan Permohonan Izin Psikologis Klinis	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Psikologis Klinis dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Psikologis Klinis			Tidak	Ya	Data Persyaratan Permohonan Izin Psikologis Klinis	5 hari	Surat Rekomendasi Izin Psikologis Klinis	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Psikologis Klinis					Surat Rekomendasi Izin Psikologis Klinis	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Psikologis Klinis	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkes					Surat Rekomendasi Izin Psikologis Klinis	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Psikologis Klinis, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Psikologis Klinis					Surat Izin Psikologis Klinis	30 menit	Surat Izin Psikologis Klinis	

7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Psikologis Klinis				Surat Izin Penelitian	15 menit	Surat Izin Psikologis Klinis	
---	--	--	--	--	-----------------------	----------	------------------------------	--



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP	106 Tahun 2019
TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS,</p> <p>HERNI SULASTI SH., M.H. Kepala Dinas Utama Muda 19670610 199503 2 002</p>

NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN TENAGA PROMOSI KESEHATAN
--------------------	--

- DASAR HUKUM**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

- KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
 2. Memahami ketentuan tentang izin tenaga promosi kesehatan.

- KETERKAITAN**
1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
 2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
 3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS

- PERALATAN DAN KELENGKAPAN**
1. Komputer
 2. Printer
 3. Aplikasi SIPANJIMAS

PERINGATAN
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

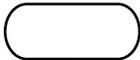
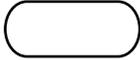
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online		Tidak Ya		Data Persyaratan Permohonan Izin Tenaga Promosi Kesehatan	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Tenaga Promosi Kesehatan			Tidak Ya	Data Persyaratan Permohonan Izin Tenaga Promosi Kesehatan	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Tenaga Promosi Kesehatan dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Tenaga Promosi Kesehatan				Data Persyaratan Permohonan Izin Tenaga Promosi Kesehatan	5 hari	Surat Rekomendasi Izin Tenaga Promosi Kesehatan	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Tenaga Promosi Kesehatan				Surat Rekomendasi Izin Tenaga Promosi Kesehatan	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Tenaga Promosi Kesehatan	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkes				Surat Rekomendasi Izin Tenaga Promosi Kesehatan	15 menit		

6	Menerima Rekomendasi Izin Penelitian, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Tenaga Promosi Kesehatan				Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan	30 menit	Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan				Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan	15 menit	Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

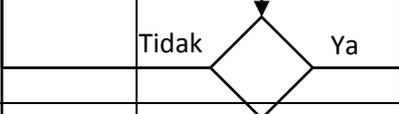
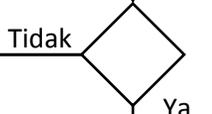
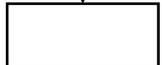
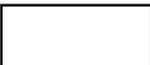
	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45/MenKes/Per/ VI/2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 979)6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin praktik elektromedis	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Elektro Medis	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Elektro Medis					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Elektro Medis	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Penelitian dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Praktik Elektro Medis					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Elektro Medis	5 hari	Surat Rekomendasi Izin Praktik Elektro Medis	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Praktik Elektro Medis					Surat Rekomendasi Izin Praktik Elektro Medis	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Praktik Elektro Medis	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan					Surat Rekomendasi Izin Penelitian	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Praktik Elektro Medis, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Praktik Elektro Medis					Surat Izin Praktik Elektro Medis	30 menit	Surat Izin Praktik Elektro Medis	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Praktik Elektro Medis					Surat Izin Praktik Elektro Medis	15 menit	Surat Izin Praktik Elektro Medis	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

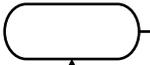
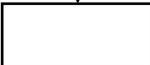
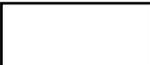
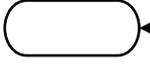
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS, HERNI BULASTI SH., M.H. Kabupaten Utama Muda 19870610 199503 2 002
NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MenKes/Per/XII/2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis (Berita Negara Republik Indoesa Tahun 2013 Nomor)6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin praktik fisioterapis	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Fisioterapis	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Fisioterapis					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Fisioterapis	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Fisioterapis dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Fisioterapis	5 hari	Surat Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis					Surat Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkes					Surat Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis	30 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Praktik Fisioterapis					Surat Izin Praktik Fisioterapis	15 menit	Surat Izin Praktik Fisioterapis	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Praktik Fisioterapis					Surat Izin Praktik Fisioterapis	15 menit	Surat Izin Praktik Fisioterapis	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

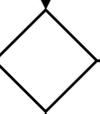
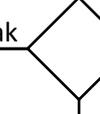
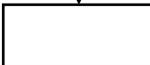
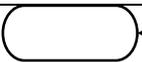
NOMOR SOP	106 Tahun 2019	
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS, HERNI BULASTI SH., M.H. Kabupaten Utama Muda 19670610 199503 2 002</p>
NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN OKUPASI TERAPIS	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013)6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin okupasi terapis	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Fisioterapis	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Okupasi Terapis					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Fisioterapis	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Fisioterapis dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Fisioterapis	5 hari	Surat Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis					Surat Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkes					Surat Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Praktik Fisioterapis, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Praktik Fisioterapis					Surat Izin Praktik Fisioterapis	30 menit	Surat Izin Praktik Fisioterapis	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Praktik Fisioterapis					Surat Izin Praktik Fisioterapis	15 menit	Surat Izin Praktik Fisioterapis	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

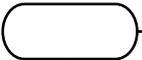
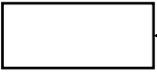
	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS, HERNI SULASTI, SH., M.H. Kabupaten Utama Muda 19870610 199503 2 002
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTEK BIDAN
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang Izin Praktek Bidan	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Bidan	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Bidan					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Bidan	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Praktik Bidan					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Bidan	14 Hari	Surat Rekomendasi Izin Praktik Bidan	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Praktik Bidan					Surat Rekomendasi Izin Praktik Bidan	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Praktik Bidan	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan					Surat Rekomendasi Izin Praktik Bidan	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Penelitian, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Praktik Bidan					Surat Izin Izin Praktik Bidan	30 menit	Surat Izin Praktik Bidan	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Praktik Bidan					Surat Izin Praktik Bidan	15 menit	Surat Izin Praktik Bidan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS, HERNI BULASTI, SH., M.H. Kabupaten Utama Muda 19670610 199503 2 002</p>
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin Praktek Dokter Hewan	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKANNAK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktek Dokter Hewan	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktek Dokter Hewan					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktek Dokter Hewan	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin dan Surat Rekomendasi Izin Praktek Dokter Hewan					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktek Dokter Hewan	6 hari	Surat Rekomendasi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Praktek Dokter Hewan					Surat Rekomendasi Izin Praktek Dokter Hewan	45 menit	Surat Rekomendasi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkannak					Surat Rekomendasi Izin Praktek Dokter Hewan	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan					Surat Izin Praktek Dokter Hewan	30 menit	Surat Izin Praktek Dokter Hewan	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Praktek Dokter Hewan					Surat Izin Praktek Dokter Hewan	15 menit	Surat Izin Praktek Dokter Hewan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP	106 Tahun 2019
TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
DISAHKAN OLEH	

NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTEK PERAWAT
--------------------	---------------------------------------

- DASAR HUKUM**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5612)
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 17/Menkes/Kep/2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

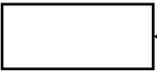
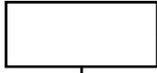
- KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
 2. Memahami ketentuan tentang Izin Praktek Perawat

- KETERKAITAN**
1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
 2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
 3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS

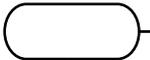
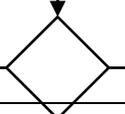
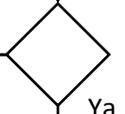
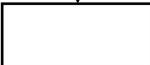
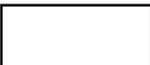
- PERALATAN DAN KELENGKAPAN**
1. Komputer
 2. Printer
 3. Aplikasi SIPANJIMAS

PERINGATAN
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Perawat	1 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Perawat					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Perawat	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Praktik Perawat					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Perawat	5 hari	Surat Rekomendasi Izin Praktik Perawat	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Praktik Perawat					Surat Rekomendasi Izin Praktik Perawat	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Praktik Perawat	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan					Surat Rekomendasi Izin Praktik Perawat	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Penelitian, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Praktik Perawat					Surat Izin Izin Praktik Perawat	30 menit	Surat Izin Praktik Perawat	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Praktik Perawat					Surat Izin Praktik Perawat	15 menit	Surat Izin Praktik Perawat	

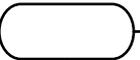
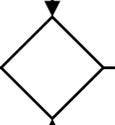
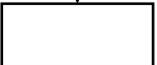
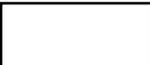
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PENEMPATAN PEDAGANG
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar 3. Perda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi. 2. Memahami ketentuan tentang izin Penempatan Pedagang	
KETERKAITAN 1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk 2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar 3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINPERINDAG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online				Data Persyaratan Permohonan Izin Penempatan Pedagang	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Penempatan Pedagang				Data Persyaratan Permohonan Izin Penempatan Pedagang	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Penempatan Pedagang dan Penerbitan Surat Rekomendasi Penempatan Pedagang				Data Persyaratan Permohonan Izin Penempatan Pedagang	3 hari	Surat Rekomendasi Izin Penempatan Pedagang	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Penempatan Pedagang				Surat Rekomendasi Izin Penempatan Pedagang	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Penempatan Pedagang	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinperindag				Surat Rekomendasi Izin Penempatan Pedagang	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Penelitian, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Penempatan Pedagang				Surat Izin Penempatan Pedagang	30 menit	Surat Izin Penempatan Pedagang	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Penempatan Pedagang				Surat Izin Penempatan Pedagang	15 menit	Surat Izin Penempatan Pedagang	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

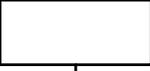
	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS,</p> <p>HERNI SULASTI SH., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19670610 199503 2 002</p>
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 19 Tahun 2011 tentang3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin Penyelenggaraan Parkir.	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINHUB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online				Data Persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Parkir	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Penyelenggaraan Parkir				Data Persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Parkir	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Parkir				Data Persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Parkir	14 hari	Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Parkir	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Parkir				Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Parkir	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Parkir	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinhub				Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Parkir	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin				Surat Izin Penyelenggaraan Parkir	30 menit	Surat Izin Penyelenggaraan Parkir	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Penyelenggaraan Parkir				Surat Izin Penyelenggaraan Parkir	15 menit	Surat Izin Penyelenggaraan Parkir	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

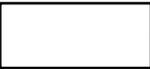
	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTEK PENATA ANESTESI
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016)6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin praktik penata anestesi	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anastesi	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anastesi					Data Persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anastesi	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Penyelenggaraan Praktek penata Anastesi dan Penerbitan Surat Rekomendasi					Data Persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anastesi	5 hari	Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anastesi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut					Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anastesi	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anastesi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkes					Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anastesi	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Praktek Penyelenggaraan Penata Anastesi, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan					Surat Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anastesi	30 menit	Surat Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anastesi	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anastesi					Surat Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anastesi	15 menit	Surat Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anastesi	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

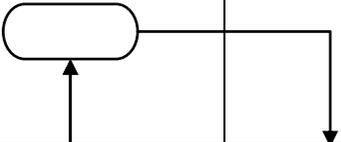
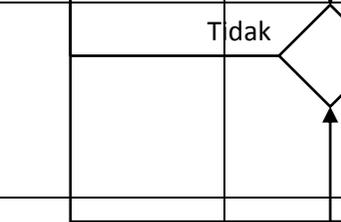
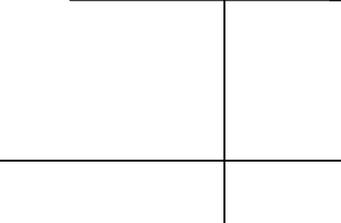
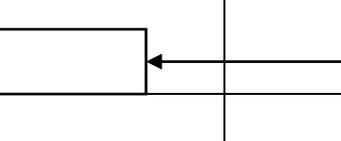
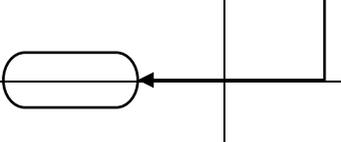
NOMOR SOP	106 Tahun 2019	
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT HEWAN ATAU KLINIK HEWAN	
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang – undang nomor 41 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi. 2. Memahami ketentuan tentang izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan.	
KETERKAITAN 1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk 2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar 3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKANNAK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan					Data Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	20 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin dan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan					Data Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan Izin	20 menit	Surat Rekomendasi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	3 hari	Surat Rekomendasi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkannak					Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan					Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	15 menit	Surat Izin	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan					Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	5 menit	Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

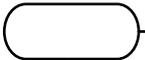
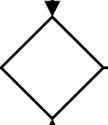
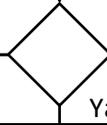
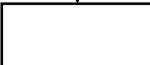
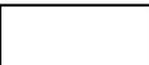
NOMOR SOP	106 Tahun 2019	
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN OPERASIONAL MENARA DAN TELEKOMUNIKASI	
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi. 2. Memahami ketentuan tentang izin Operasional Menara dan Telekomunikasi.	
KETERKAITAN 1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk 2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar 3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKOMINFO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi					Data Persyaratan Permohonan Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin dan Penerbitan Surat Rekomendasi					Data Persyaratan Permohonan Izin Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi	2 hari	Surat Rekomendasi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi					Surat Rekomendasi Operasional Izin Menara dan Telekomunikasi	45 menit	Surat Rekomendasi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkominfo					Surat Rekomendasi Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin , memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin					Surat Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi	30 menit	Surat Izin Operasional	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi					Surat Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi	515menit	Surat Izin Operasional	

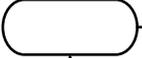
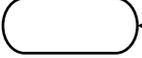


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

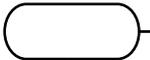
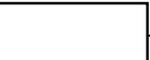
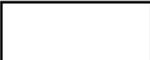
	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PENELITIAN
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20113. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin penelitian.	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

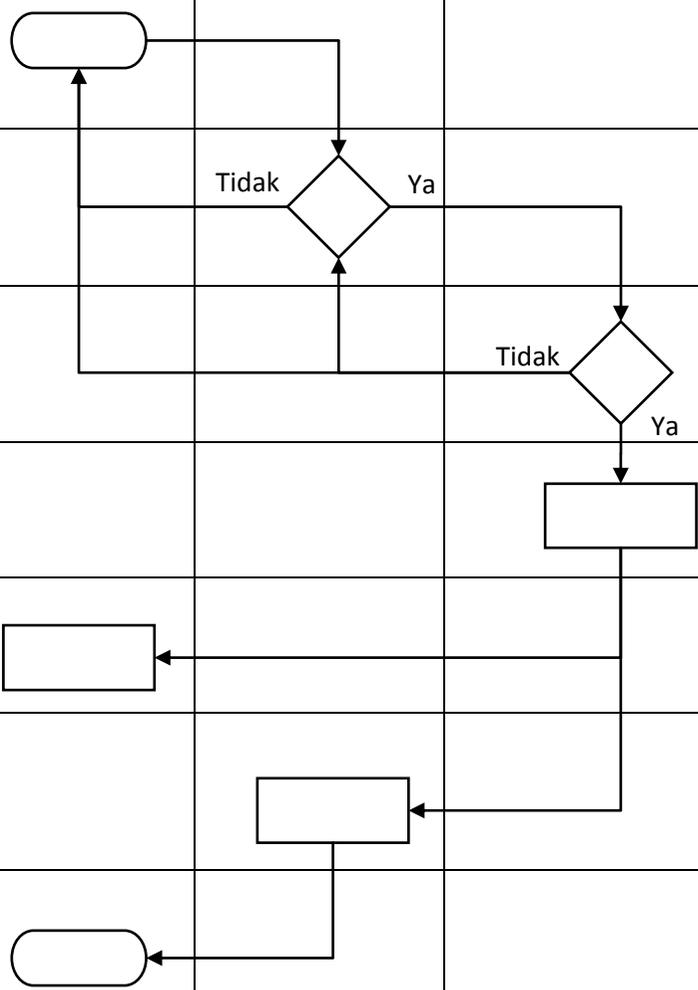
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	KESBANGPOL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Penelitian	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Penelitian					Data Persyaratan Permohonan Izin Penelitian	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Penelitian dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian					Data Persyaratan Permohonan Izin Penelitian	1 hari	Surat Rekomendasi Izin Penelitian	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Penelitian					Surat Rekomendasi Izin Penelitian	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Penelitian	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Kesbangpol					Surat Rekomendasi Izin Penelitian	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Penelitian, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Penelitian					Surat Izin Penelitian	30 menit	Surat Izin Penelitian	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Penelitian					Surat Izin Penelitian	5 menit	Surat Izin Penelitian	

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN USAHA PENGGILANGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Keputusan Kementerian Republik Indonesia No. 859/TP.250/11/98 tanggal 4 Nopember 1998 tentang Pdoman Pembinaan Perusahaan Pengilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras; 3. Keputusan Kementerian Republik Indonesia No. 32/Permentan/OT.140/3/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Pelarangan Penggunaan bahan Kimia Berbahaya padaProses Pengilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 7 tahun 1993 tentang Perusahaan Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras; 5. Keputusan Bupati Banyumas No. 521/293/2009 tentang Tingkat Kejenuhan Perusahaan Pengilingan padi, Huller dan penyosohan Beras di Kabupaten Banyumas Tahun 2009 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik. 	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi. 2. Memahami ketentuan tentang izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras 	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk 2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar 3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS 	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SIPANJIMAS 	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINPERTAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online				Data Persyaratan Permohonan Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras		Tidak	Ya	Data Persyaratan Permohonan Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras			Tidak	Data Persyaratan Permohonan Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	5 hari	Surat Rekomendasi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras				Surat Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	45 menit	Surat Rekomendasi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari				Surat Rekomendasi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin , memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras				Surat Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	30 menit	Surat Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras				Surat Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	15 menit	Surat Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN HEMODIALISA
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 812 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi. 2. Memahami ketentuan tentang izin Hemodialisa	
KETERKAITAN 1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk 2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar 3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

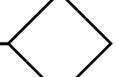
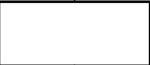
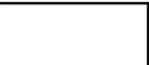
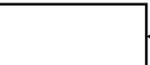
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Hemodialisa	5 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Hemodialisa					Data Persyaratan Permohonan Izin Hemodialisa	10 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Hemodialisa dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Hemodialisa					Data Persyaratan Permohonan Izin Hemodialisa	14 Hari	Surat Rekomendasi Izin Hemodialisa	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Hemodialisa					Surat Rekomendasi Izin Hemodialisa	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Hemodialisa	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan					Surat Rekomendasi Izin Hemodialisa	10 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Penelitian, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Hemodialisa					Surat Izin Hemodialisa	10 menit	Surat Izin Hemodialisa	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Hemodialisa					Surat Izin Hemodialisa	5 menit	Surat Izin Hemodialisa	





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

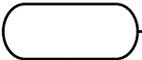
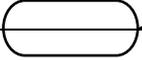
	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT HEWAN ATAU KLINIK HEWAN
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang – undang nomor 41 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi. 2. Memahami ketentuan tentang izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan.	
KETERKAITAN 1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk 2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar 3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

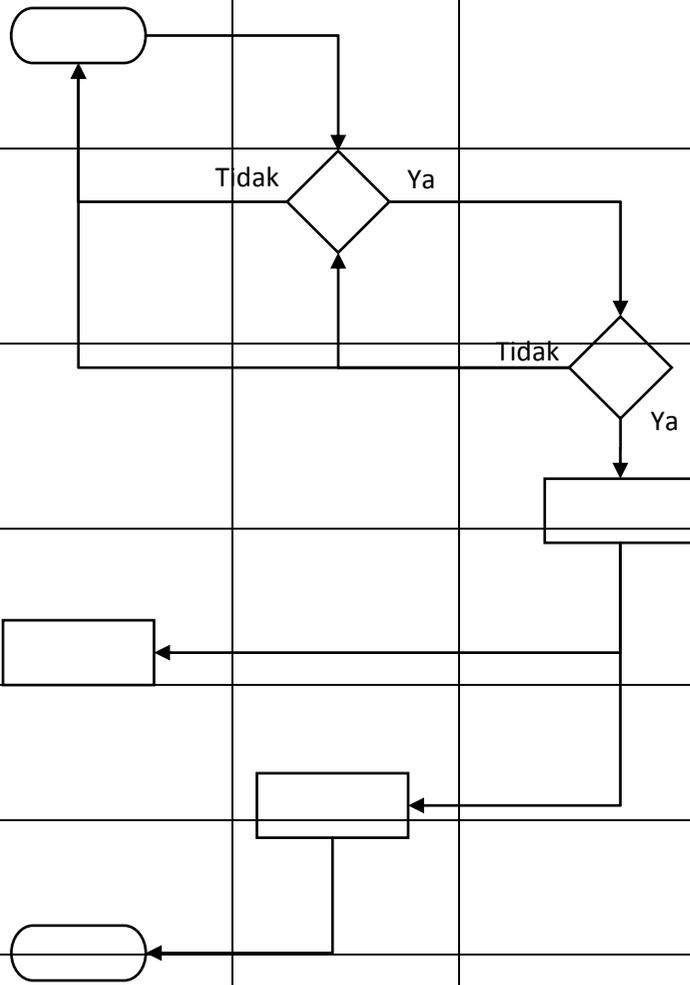
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKANNAK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan					Data Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	20 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin dan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan					Data Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan Izin	20 menit	Surat Rekomendasi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	3 hari	Surat Rekomendasi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkannak					Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan					Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	15 menit	Surat Izin	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan					Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	5 menit	Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP	106 Tahun 2019	
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN OPERASIONAL MENARA DAN TELEKOMUNIKASI	
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi. 2. Memahami ketentuan tentang izin Operasional Menara dan Telekomunikasi.	
KETERKAITAN 1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk 2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar 3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

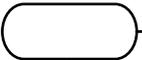
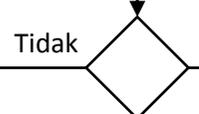
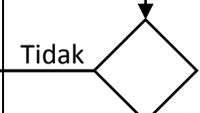
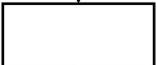
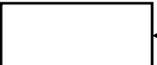
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKOMINFO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi					Data Persyaratan Permohonan Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin dan Penerbitan Surat Rekomendasi					Data Persyaratan Permohonan Izin Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi	2 hari	Surat Rekomendasi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi					Surat Rekomendasi Operasional Izin Menara dan Telekomunikasi	45 menit	Surat Rekomendasi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkominfo					Surat Rekomendasi Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin , memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin					Surat Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi	30 menit	Surat Izin Operasional	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi					Surat Izin Operasional Menara dan Telekomunikasi	515menit	Surat Izin Operasional	





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

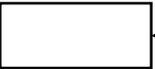
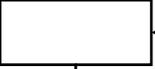
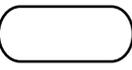
NOMOR SOP	106 Tahun 2019	
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA	
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi. 2. Memahami ketentuan tentang izin lembaga pelatihan tenaga kerja indonesia swasta	
KETERKAITAN 1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk 2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar 3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINAKERKOP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Swasta					Data Persyaratan Permohonan Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin dan Surat Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Swasta					Data Persyaratan Permohonan Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	6 hari	Surat Rekomendasi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Swasta					Surat Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	45 menit	Surat Rekomendasi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinsosnakertran					Surat Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan					Surat Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	30 menit	Surat Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Swasta					Surat Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	15 menit	Surat Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

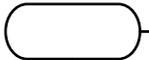
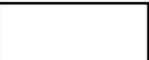
	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS, HERNI BULASTI, SH., M.H. Kabupaten Utama Muda 19870610 199503 2 002
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN OPERASIONAL RADIOLOGI
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 780 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi. 2. Memahami ketentuan tentang izin operasional radiologi.	
KETERKAITAN 1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk 2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar 3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

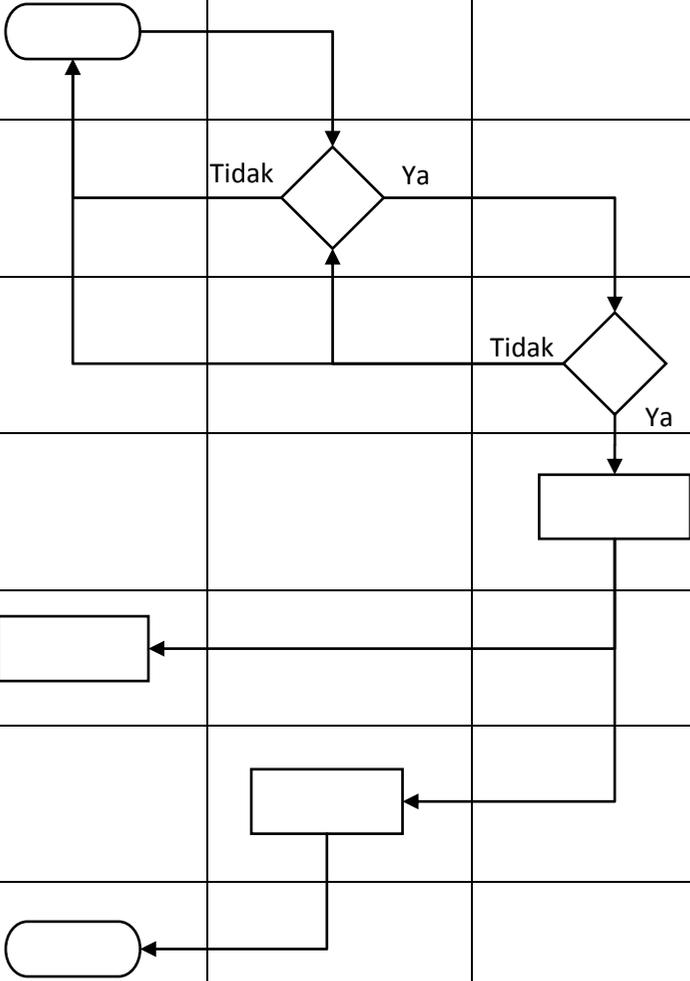
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Operasional Radiologi	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Operasional Radiologi					Data Persyaratan Permohonan Izin Operasional Radiologi	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Operasional Radiologi dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Radiologi					Data Persyaratan Permohonan Izin Operasional Radiologi	14 hari	Surat Rekomendasi Izin Operasional Radiologi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Operasional Radiologi					Surat Rekomendasi Izin Operasional Radiologi	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Operasional Radiologi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan					Surat Rekomendasi Izin Operasional Radiologi	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Penelitian, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Operasional Radiologi					Surat Izin Operasional Radiologi	30 menit	Surat Izin Operasional Radiologi	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Operasional Radiologi					Surat Izin Operasional Radiologi	15 menit	Surat Izin Operasional Radiologi	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP	106 Tahun 2019
TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS, HERNI BULASTI SH., M.H. Kabupaten Utama Muda 19670610 199503 2 002</p>
NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN OPERASIONAL UNIT TRANSFUSI DARAH
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 478 Tahun 1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah.3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 662 Tahun 1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Donor Darah.4. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan No. 114 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No. 478 Tahun 1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah.5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin operasional unit transfusi darah
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>

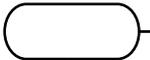
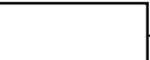
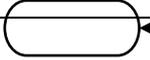
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Operasional Unit Transfusi Darah	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Operasional Unit Transfusi Darah					Data Persyaratan Permohonan Izin Operasional Unit Transfusi Darah	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Penelitian dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Unit Transfusi Darah					Data Persyaratan Permohonan Izin Operasional Unit Transfusi Darah	14 hari	Surat Rekomendasi Izin Operasional Unit Transfusi Darah	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Operasional Unit Transfusi Darah					Surat Rekomendasi Izin Operasional Unit Transfusi Darah	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Operasional Unit Transfusi Darah	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan					Surat Rekomendasi Izin Operasional Unit Transfusi Darah	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Operasional Unit Transfusi Darah, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Operasional Unit Transfusi Darah					Surat Izin Operasional Unit Transfusi Darah	30 menit	Surat Izin Operasional Unit Transfusi Darah	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Operasional Unit Transfusi Darah					Surat Izin Operasional Unit Transfusi Darah	15 menit	Surat Izin Operasional Unit Transfusi Darah	

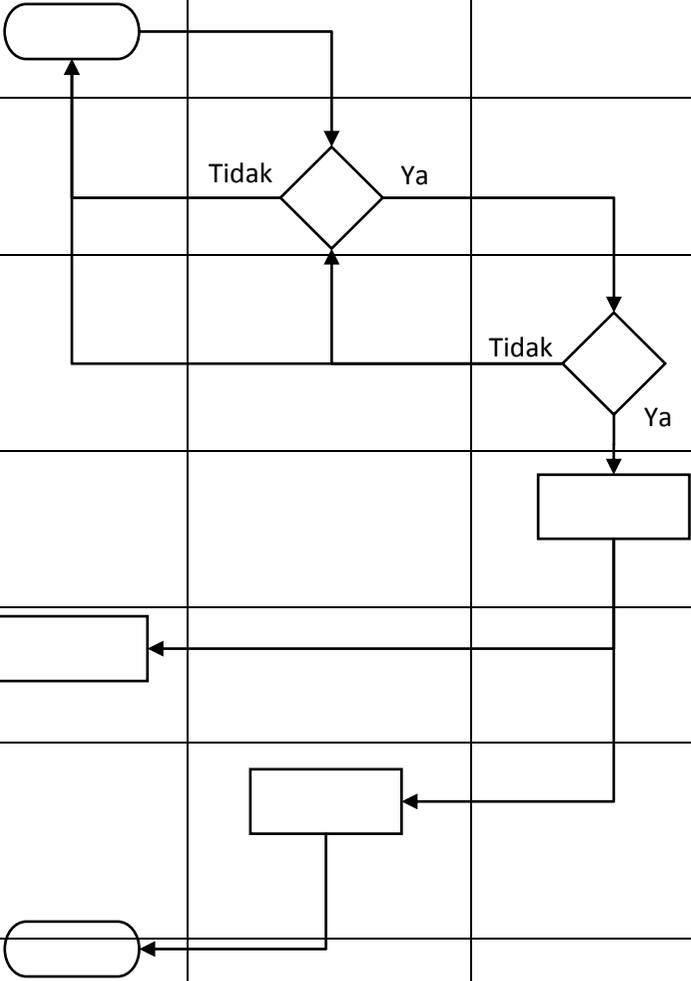




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP	106 Tahun 2019	
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS, HERNI BULASTI, SH., M.H. Kabupaten Utama Muda 19670610 199503 2 002</p>
NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol;4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;5. Peraturan Bupati No. 04 tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara IPTMB dan SIUPMB.6. Perbub No. 05 tahun 2016 Tentang penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu.7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

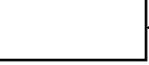
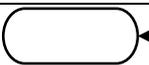
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINPERINDAG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Tempat Penjualan Minol	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					Data Persyaratan Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Tempat Penjualan Minol dan Penerbitan Surat Rekomendasi Tempat Penjualan Minol					Data Persyaratan Permohonan Izin Tempat Penjualan Minol	3 hari	Surat Rekomendasi Izin Tempat Penjualan Minol	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Tempat Penjualan Minol					Surat Rekomendasi Izin Tempat Penjualan Minol	15 menit	Surat Rekomendasi Izin Tempat Penjualan Minol	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinperindag					Surat Rekomendasi Izin Tempat Penjualan Minol	30 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Penelitian, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	30 menit	Surat Izin Tempat Penjualan Minol	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol					Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	15 menit	Surat Izin Tempat Penjualan Minol	

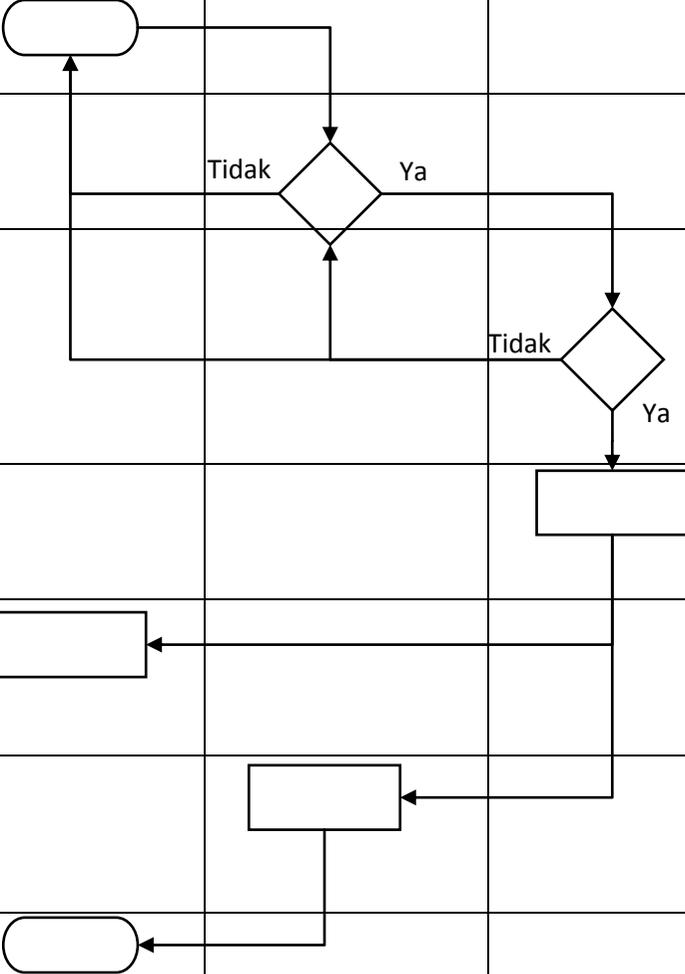




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS, HERNI BULASTI, SH., M.H. Kabupaten Utama Muda 19870610 199503 2 002</p>
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN TRAYEK
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin Trayek	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

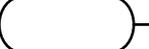
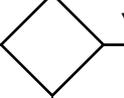
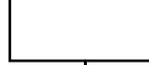
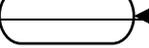
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINHUB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Trayek	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Trayek					Data Persyaratan Permohonan Izin Trayek	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Trayek dan Surat Rekomendasi Izin Trayek					Data Persyaratan Permohonan Izin Trayek	1 hari	Surat Rekomendasi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Trayek					Surat Rekomendasi Izin Trayek	45 menit	Surat Rekomendasi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinhub					Surat Rekomendasi Izin Trayek	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Trayek					Surat Izin Trayek	30 menit	Surat Izin Trayek	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Trayek					Surat Izin Trayek	15 menit	Surat Izin Trayek	





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

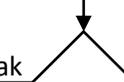
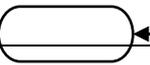
NOMOR SOP	106 Tahun 2016	
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.3. Peraturan Kemendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DIKNAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)					Data Persyaratan Permohonan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin dan Surat Rekomendasi Izin Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)					Data Persyaratan Permohonan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	30 hari	Surat Rekomendasi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)					Surat Rekomendasi Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	45 menit	Surat Rekomendasi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Diknas					Surat Rekomendasi Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	30 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan					Surat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	30 menit	Surat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)					Surat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	15 menit	Surat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

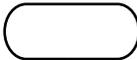
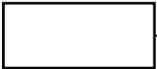
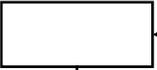
	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS, HERNI BULASTI SH., M.H. Kabupaten Utama Muda 19870610 199503 2 002
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI DAN MULUT
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20/Menkes/Per/IV/2016 tetang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 889)6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin praktek terapis gigi dan mulut.	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

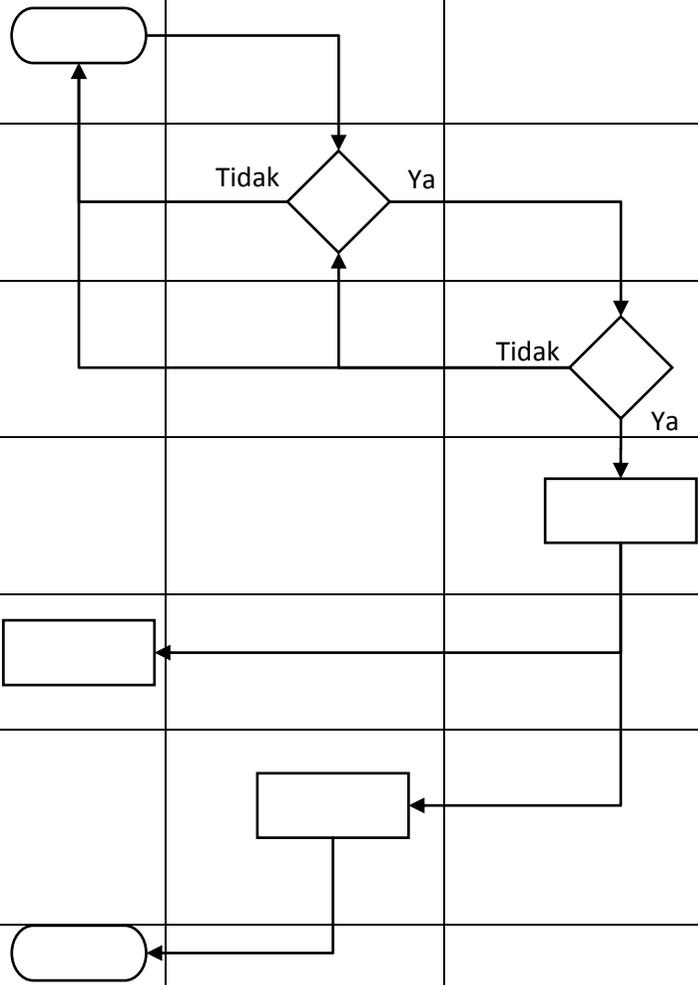
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut	14 hari	Surat Rekomendasi Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut					Surat Rekomendasi Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkes					Surat Rekomendasi Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut					Surat Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut	30 menit	Surat Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut					Surat Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut	15 menit	Surat Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS, HERNI BULASTI SH., M.H. Kabupaten Utama Muda 19870610 199503 2 002
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerja dan Praktik Terapis Wicara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 719)6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin praktik terapis wicara.	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

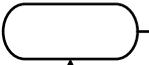
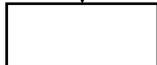
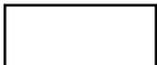
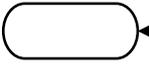
No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Terapis Wicara	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Terapis Wicara					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Terapis Wicara	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Penelitian dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Praktik Terapis Wicara					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Terapis Wicara	5 hari	Surat Rekomendasi Izin Praktik Terapis Wicara	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Praktik Terapis Wicara					Surat Rekomendasi Izin Praktik Terapis Wicara	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Praktik Terapis Wicara	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkes					Surat Rekomendasi Izin Praktik Terapis Wicara	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Praktik Terapis Wicara, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Praktik Terapis Wicara					Surat Izin Praktik Terapis Wicara	30 menit	Surat Izin Praktik Terapis Wicara	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Praktik Terapis Wicara					Surat Izin Praktik Terapis Wicara	15 menit	Surat Izin Praktik Terapis Wicara	





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

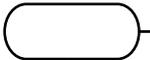
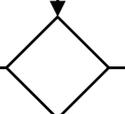
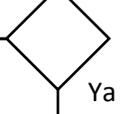
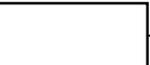
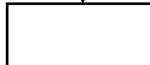
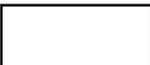
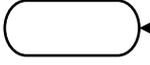
NOMOR SOP	106 Tahun 2019	
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS, HERNI BULASTI SH., M.H. Kabupaten Utama Muda 19870610 199503 2 002</p>
NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN REKLAME	
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. 3. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi. 2. Memahami ketentuan tentang izin Reklame.	
KETERKAITAN 1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk 2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar 3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.	PENCATATAN DAN PENDATAAN Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	BKD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Reklame	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Reklame					Data Persyaratan Permohonan Izin Reklame	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin dan Surat Rekomendasi Izin Reklame					Data Persyaratan Permohonan Izin Reklame	1 hari	Surat Rekomendasi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Reklame					Surat Rekomendasi Izin Reklame	45 menit	Surat Rekomendasi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari BKD					Surat Rekomendasi Izin Reklame	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Reklame					Surat Izin Reklame	30 menit	Surat Izin Reklame	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Reklame					Surat Izin Reklame	15 menit	Surat Izin Reklame	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTEK TENAGA AHLI LABORATORIUM MEDIK
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin Praktik Tenaga Ahli Laboratorium Medik.	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik TALM	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Tenaga Ahli Laboratorium Medik					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Tenaga Ahli Laboratorium Medik	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik dan Penerbitan Surat Rekomendasi Tenaga Ahli Laboratorium Medik					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Tenaga	14 hari	Surat Rekomendasi Izin Praktik	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Ahli Laboratorium Medik					Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Ahli Laboratorium Medik	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Praktik	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan					Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Ahli Laboratorium Medik	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Penelitian, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Praktik TALM					Surat Izin Praktik Tenaga Ahli Laboratorium Medik	30 menit	Surat Izin Praktik	

7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Praktik Tenaga Ahli Laboratorium Medik				Surat Izin Praktik Tenaga Ahli Laboratorium Medik	15 menit	Surat Izin PraktikTALM	
---	---	--	--	--	---	----------	------------------------	--



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR SOP	106 Tahun 2019
TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS, HERNI SULASTI, SH., M.H. Kabidina Utama Muda 19870610 199503 2 002</p>

NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTEK TENAGA TEHNIK KEFARMASIAN
--------------------	---

- DASAR HUKUM**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124)
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

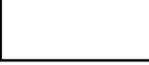
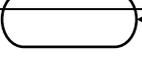
- KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.
 2. Memahami ketentuan tentang izin praktik tenaga teknis kefarmasian.

- KETERKAITAN**
1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk
 2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar
 3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS

- PERALATAN DAN KELENGKAPAN**
1. Komputer
 2. Printer
 3. Aplikasi SIPANJIMAS

PERINGATAN
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.

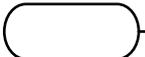
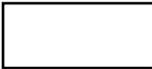
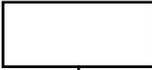
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Tenaga Tehnik Kefarmasian	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan Izin Praktik Tenaga Tehnik Kefarmasian					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Tenaga Tehnik Kefarmasian	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan Izin dan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Tehnik Kefarmasian					Data Persyaratan Permohonan Izin Praktik Tenaga Tehnik Kefarmasian	5 hari	Surat Rekomendasi Izin Praktik	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Tehnik Kefarmasian					Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Tehnik Kefarmasian	45 menit	Surat Rekomendasi Izin Praktik	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan					Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Tehnik Kefarmasian	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi Izin Penelitian, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan Izin Praktik Tenaga Tehnik Kefarmasian					Surat Izin Izin Praktik Tenaga Tehnik Kefarmasian	30 menit	Surat Izin Praktik Tenaga Tehnik Kefarmasian	
7	Menerima Notifikasi dan Surat Izin Praktik Tenaga Ahli Laboratorium Medik					Surat Izin Praktik Tenaga Tehnik Kefarmasian	15 menit	Surat Izin Praktik Tenaga Tehnik Kefarmasian	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

	NOMOR SOP	106 Tahun 2019
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Juni 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	20 Juni 2019
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP AP	PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)3. Undang - Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477)6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer/aplikasi.2. Memahami ketentuan tentang izin praktik tenaga gizi	
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP-AP Administrasi Surat Masuk2. SOP-AP Administrasi Surat Keluar3. SOP-AP Pengelolaan Aplikasi SIPANJIMAS	PERALATAN DAN KELENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Aplikasi SIPANJIMAS	
PERINGATAN <p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proses yang lain.</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Hasil SOP ini dicatat dan didata sesuai dengan jenisnya.</p>	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		PEMOHON	DPMPPTSP	DINKES	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Login melalui Aplikasi Perizinan Online					Data Persyaratan Permohonan izin praktik tenaga gizi	15 menit		
2	Verifikasi Data Permohonan izin praktik tenaga gizi		Tidak	Ya		Data Persyaratan Permohonan izin praktik tenaga gizi	30 menit	Data Persyaratan Permohonan yang terverifikasi	
3	Verifikasi Data Permohonan izin praktik tenaga gizi dan Penerbitan Surat Rekomendasi izin praktik tenaga gizi			Tidak	Ya	Data Persyaratan Permohonan izin praktik tenaga gizi	5 hari	Surat Rekomendasi izin praktik tenaga gizi	
4	Mencetak dan/atau memproses Surat Rekomendasi izin praktik tenaga gizi					Surat Rekomendasi izin praktik tenaga gizi	45 menit	Surat Rekomendasi izin praktik tenaga gizi	
5	Mencetak dan/atau menerima Notifikasi Surat Rekomendasi dari Dinkes					Surat Rekomendasi izin praktik tenaga gizi	15 menit		
6	Menerima Rekomendasi izin praktik tenaga gizi, memproses, dan Menerbitkan Surat Keputusan izin praktik tenaga gizi					Surat izin praktik tenaga gizi	30 menit	Surat izin praktik tenaga gizi	

7	Menerima Notifikasi dan Surat izin praktik tenaga gizi				Surat izin praktik tenaga gizi	15 menit	Surat izin praktik tenaga gizi	
---	--	--	--	--	--------------------------------	----------	--------------------------------	--